

## Banjir Gedebage Butuh Penanganan Komprehensif

**BANDUNG (IM)** - Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga mengatakan, persoalan banjir di wilayah Bandung Timur khususnya Gedebage diperlukan penanganan secara maksimal.

"Kalau tidak dilakukan penanganan secara komprehensif, kondisinya akan seperti itu terus. Tidak hanya wilayah Gedebage, beberapa wilayah lain juga," kata Rendiana Awangga, Senin (12/12).

Rendiana Awangga menyebutkan, bahwa kondisi drainase yang tidak sebanding dengan debit air menjadi penyebab banjir di kawasan Gedebage. Rumah pompa yang ada hanya bersifat sementara.

"Rumah pompa hanya penanganan sementara untuk mengurangi volume air di sana. Tetapi berbicara persoalan banjir, kepala daerah siapapun itu, tidak akan terlakkan. Seperti di Gedebage," ucapnya.

Menurut Rendiana, kondisi drainase yang tak ideal dan usang tidak hanya didapati di kawasan Gedebage. Akan tetapi, juga terjadi di sejumlah wilayah yang ada di kota berjudik Paris van Java tersebut.

Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Kota Bandung, Dini Dianawati mengatakan, banjir di Gedebage diakibatkan luapan sungai.

"Iya kembali banjir. Sunganai Cipamulihan meluap. Kemarin intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Sebetulnya rumah pompa masih beroperasi. Tetapi karena debit air tinggi, rumah pompa tidak maksimal," kata Dini Dianawati.

Diketahui, hujan deras pada Minggu 11 Desember 2022 mengakibatkan wilayah Gedebage, Kota Bandung kembali banjir. Antrian panjang kendaraan tidak terelakkan karena kondisi tersebut. **● pra**

### SEMPAT CAKAR ANAK SD

## Monyet Berkeliaran di Permukiman Warga Bogor

**BOGOR (IM)** - Seekor monyet berkeliaran di permukiman warga di Tegallaga, Bogor Tengah, Kota Bogor. Kemunculan monyet itu meresahkan warga karena sempat melukai anak-anak.

Dalam rekaman video yang beredar, awalnya seekor monyet tampak di atas kanopi pintu rumah warga. Pada saat bersamaan, ada seorang warga yang berusaha menangkap monyet tersebut. Namun kemudian monyet itu melompat ke atas atap rumah warga.

"Monyet liar meresahkan warga," tulis salah satu pemilik akun Instagram memberi keterangan pada video yang dipostingnya seperti dilihat, Minggu (11/12).

Warga Tegallaga, Yuli, mengatakan monyet itu sudah ada sejak sekitar sepekan lalu di kawasan Malabar. Diduga, monyet tersebut merupakan peliharaan seseorang yang lepas.

"Monyetnya sudah sekitar satu minggu. Ini meresahkan banget, karena banyak anak kecil di sini dan si monyet berkeliaran di

permukiman warga," kata Yuli. "Kayaknya itu peliharaan, cuma lepas. Soalnya ada kalung rantai di lehernya, kayanya talinya putus itu," tambahnya.

Yuli berharap petugas dari Kota Bogor mengevaluasi monyet tersebut. Yuli cerita ada anak SD yang sempat dicakar oleh monyet tersebut.

"Kita sih pengennya itu ditangkap, kalau ada yang punya mestinya ditangkap itu monyetnya. Sudah lukai anak-anak di sini soalnya, ada satu orang yang dicakar, anak kecil (yang dicakar) masih SD kelas V," terang Yuli.

Sementara itu, Damkar Kota Bogor mengaku sudah mendapat laporan terkait monyet di permukiman warga. Tim Damkar sedang proses menangkap monyet tersebut.

"Kita sudah monitor (keberadaan monyet liar), anggota sedang ke lokasi untuk evakuasi," ucap Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor, Ade Nugraha, ketika dimintai konfirmasi. **● jay**

## DPRD Minta Kualitas Pendidikan di Kabupaten Cirebon Ditingkatkan

**CIREBON (IM)** - Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menilai, lembaga pendidikan di daerah ini harus berbenah. Mutu dan kualitas pendidikan di masing-masing lembaga pendidikan tentunya perlu untuk terus ditingkatkan.

Belum lama ini juga, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Badan Akreditasi Nasional SD/ Madrasah di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat.

Kunjungan itu, sebagai tindak lanjut dari adanya temuan beberapa SD Negeri yang mendapatkan nilai akreditasi A.

Tetapi kenyataannya masih memprihatinkan. Baik dari segi sarana prasarannya, maupun SDM pendidikannya.

"Serta sistem pembelajarannya masih memprihatinkan," kata Koordinator Komisi IV DPRD Kab Cirebon, Rudiana, Senin (12/12). Menurut Rudiana, Komisi IV menginginkan penjelasan sejauh mana penilaian yang dilakukan oleh tim akreditasi dari BAN SM ketika melakukan akreditasi.

Akhirnya didapatkan informasi bahwa banyak SDN yang masih memperoleh akreditasi di tahun 2014 dan belum melakukan akreditasi ulang.

"Padahal, akreditasi itu, harusnya diperbaharui per 5 tahun. Pantas saja, ketika banyak sekolah yang nilai akreditasinya tidak sesuai dengan kondisi terbaru. "Di tahun 2022 SDN yang terakreditasi hanya 11 SDN. Nilainya ada yang mendapatkan A, B dan C," katanya.

Pihaknya meminta agar BAN SM Akreditasi nantinya tidak hanya dipergunakan un-

tuk menaikkan image sekolah dengan nilai. Tapi sebagai data untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah, keterkaitan dengan mutu dan kualitas pendidikan.

Basis data yang digunakan dalam penilaian akreditasi salah satunya adalah dapodik. Namun banyak kejadian pada saat pengisian dapodik sekolah, data yang diberikan berbeda dengan kondisi riil di sekolah. Data yang diberikan data yang bagus-bagus, demi mempengaruhi nilai akreditasi sekolah.

Pihaknya pun mempertanyakan seberapa penting nilai akreditasi terhadap dampak keberlangsungan pendidikan di sekolah. Apalagi saat ini adanya sistem zonasi calon peserta didik baru yang mau mendaftar ke sekolah, tidak bisa memilih mana sekolah yg punya nilai akreditasi yang baik yang akan mereka tuju.

"Kita juga menanyakan keterkaitan tim akreditasi atau assesor dalam melakukan penilaian. Mereka harus mengedepankan prinsip-prinsip akreditasi secara obyektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel dan profesional," ungkapnya.

Rudiana menambahkan, apakah prinsip itu, dijalankan secara optimal atau tidak, sehingga nilai akreditasi bisa dipertanggungjawabkan. Bagi sekolah yang sudah diakreditasi, selain mendapatkan nilai, sekolah juga mesti mendapatkan catatan rekomendasi yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi.

"Demi pembenahan untuk bisa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di masing-masing lembaganya. Semua ini, kita lakukan agar ke depan, kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon bisa meningkat," tukasnya. **● pra**

# 8 | Nusantara

IDN/ANTARA



### DISKUSI JURNALISME BERKUALITAS UNTUK PERADABAN BANGSA

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pemaparan pada diskusi Jurnalisme Berkualitas Untuk Peradaban Bangsa di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/12). Diskusi yang digelar oleh Dewan Pers tersebut merupakan rangkaian dari Anugerah Dewan Pers 2022.

## Si Linda, Aplikasi Disdagin Kab. Bogor untuk Memprediksi Inflasi Daerah

Pemkab Bogor punya cadangan anggaran untuk melakukan operasi pasar murah, dengan berdasarkan data yang ada di aplikasi Si Linda. "Melalui aplikasi ini kami bisa melihat komoditi bahan pokok apa yang mahal harganya dan sedang dibutuhkan oleh masyarakat," tutur Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

**BOGOR (IM)** - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor menggunakan aplikasi Si Linda (sistem informasi pengendalian inflasi daerah) untuk memprediksi kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Seperti biasa, harga bahan-

bahan pokok berpotensi naik seiring akan tiba liburan Hari Natal dan Tahun Baru 2023 mendatang.

"Untuk memprediksi kenaikan harga bahan-bahan pokok jelang Liburan Haru Natal dan Tahun Baru 2023, kami mulai menggunakan aplikasi Si

Linda, dengan data di aplikasi ini, kami pun melaporkan potensi kenaikan harga atau inflasi tersebut ke Pemprov Jawa Barat untuk mengendalikan harga bahan-bahan pokok," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Entis Sutisna kepada wartawan, Senin (12/12).

Entis Sutisna menambahkan, selain melalui aplikasi, jajarannya juga bisa mengecek secara manual informasi harga bahan-bahan pokok ke Kepala Unit Pasar Rakyat.

"Kami juga bisa mengecek langsung ke 30 Kepala Unit Pasar Rakyat di Bumi Tegar Beriman, terkait harga bahan-bahan pokok," tambah mantan Camat Ciampea ini.

Plt Bupati Bogor, Iwan

Setiawan menuturkan berdasarkan pantauannya ke Pasar Ciawi, hanya sedikit komoditi bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, seperti harga daging ayam dari Rp33 ribu menjadi Rp35 ribu perkilogramnya.

Namun kenaikan harga beberapa komoditi bahan pokok tersebut, langsung bisa diantisipasi oleh Pemkab Bogor melalui program kerja operasi pasar murah.

"Pemkab Bogor punya cadangan anggaran untuk melakukan operasi pasar murah, dengan berdasarkan data yang ada di aplikasi Si Linda, maka kami bisa melihat komoditi bahan pokok apa yang

mahal harganya dan sedang dibutuhkan oleh masyarakat," tutur Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

Ayah lima orang anak ini melanjutkan kenaikan harga bahan-bahan pokok, maka pemerintah daerah diperbolehkan membeli langsung ke daerah penghasil komoditi tersebut atau mensubsidi ongkos kirim (transportasi) kepada para distributor atau pedagang.

"Hingga saat ini, Alhamdulillah tidak ada kenaikan harga bahan pokok yang signifikan, kenaikan harga karena akan masuk masa liburan dan bukannya kelangkaan komoditi bahan pokok," lanjutnya. **● gio**

IDN/ANTARA



### BENCANA LONGSOR DI CIAMI

Foto udara material tanah longsor yang menimbun rumah warga di Dusun Legok 2, Desa Indragiri, Kecamatan Panawangan, Jawa Barat, Senin (12/12). Curah hujan yang tinggi di Kabupaten Ciamis mengakibatkan empat rumah tertimbun tanah longsor dan sebanyak 51 rumah terancam longsor susulan, bahkan jika hujan melanda warga terpaksa harus mengungsi ke rumah saudaranya.

## PWI Kab. Bogor Gelar Pemahaman KEJ dan UU Pers No 40 Tahun 1999 di Tenjolaya

**BOGOR (IM)** - Dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Pers Tahun 1999, PWI Kabupaten Bogor terjun ke wilayah-wilayah kecamatan se-Kabupaten Bogor. Tujuannya agar peran wartawan sebagai media informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial berjalan sebagaimana aturan.

Sinergitas wartawan dan nara sumber harus berjalan sebagaimana mestinya. Dan untuk itu PWI Kabupaten Bogor, menggelar sosialisasi KEJ UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan KIP dalam acara Safari Jurnalistik di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Senin, (12/12).

Acara sosialisasi Kode Etik Jurnalistik dengan pemateri Subagiyo, Ketua PWI Kabupaten Bogor, dan Ketua Bidang Advokasi PWI, Deddy Juliawan.

Di hadapan para Kepala UPT, kepala Desa dan kepala Sekolah se-kecamatan Tenjolaya, Ketua PWI Subagiyo menyampaikan, kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang UUD Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik dan terkait kinerja wartawan yang beretika.

Subagiyo menyampaikan jika pihaknya bukan bermaksud menggurui dalam pelaksanaan sosialisasi, namun sharing pengalaman maupun wawasan serta berupaya menjaga

nama baik profesi wartawan yang mulai terkikis oleh sejumlah oknum," ujarnya. Dia menjelaskan, sosialisasi hukum dan KEJ adalah agenda rutin PWI Kabupaten Bogor. Saya berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan pencerahan dalam penyelesaian sengketa pemberitaan di media sosial.

Ketua PWI ini juga mengucapkan terimakasih atas kerjasama panitia penyelenggara yang telah menyusun seluruh rangkaian kegiatan ini dengan tetap menjaga keompakan dan penuh rasa tanggungjawab," ucap Subagiyo.

"Kedepannya, untuk mengantisipasi oknum yang diduga sering mengintimidasi narasumber. Para peserta yang hadir memiliki hak jawab," kata Subagiyo. "Kalau ada oknum wartawan yang mengintimidasi. Yaitu hak narasumber apakah memberi keterangan atau tidak kepada wartawan," ujarnya.

Camat Tenjolaya mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada PWI yang telah berkenan hadir dengan berbagai wawasan dan pengetahuan tentang dunia ke-wartawanan.

"Karena era digital semua informasi langsung bisa diakses terlebih lagi seperti informasi media sosial. Sehingga siapapun bisa menjadi wartawan," katanya saat membuka acara Safari Jurnalistik yang di prakarsai oleh PWI Kabupaten Bogor. **● gio**



### PAMERAN MEJAMEJA HANI MONIAGA DI SEMARANG

Pengunjung menyaksikan koleksi kerajinan dekorasi dan mebel pada Pameran MejaMeja Hani Moniaga di Gedung Oudetrapp, Kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/12). Berbagai macam produk kerajinan dekorasi dan mebel dari sejumlah jenis limbah kayu seperti kayu trembesi, kelengkeng, mahoni dan jati itu dipasarkan di sejumlah wilayah di Indonesia serta telah menembus pasar Asia, Amerika dan Eropa dengan harga hingga ratusan juta rupiah tergantung jenis kayu dan tingkat kesulitan pembuatannya.